

Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

Falentina Kiranasari¹, Ahmad Tohardi², Siti Aisyah

Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak

kiranasari2709@gmail.com¹, ahmadtohardi@faperta.untan.ac.id²

aisyah@ecampus.ut.ac.id

ABSTRACT

Stunting has been designated as a national priority issue. The target to reduce stunting by 27.6% in 2019 is expected to be 14% in 2024. Based on the 2021 Indonesian Nutrition Status (SSGI) results, Sintang District has the second largest stunting prevalence rate in West Kalimantan, which is 38.2%. So that the high prevalence of stunting can hamper efforts to improve public health and develop the quality of human resources. With the issuance of Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction, where the BKKBN is the Chief Executive, it certainly has an impact on the need for program coordination and convergence in the field. So that this automatically results in the Office of Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection in Sintang Regency, which is an extension of the West Kalimantan Provincial BKKBN Representative, responsible for accelerating the reduction of stunting in Sintang District. Hence, the Office of Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection in Sintang Regency are making endeavors to expedite the reduction of stunting through diverse strategies. The aim of this research was to comprehend the execution of measures for accelerating the decline of stunting at the Sintang District Office of Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection, guided by the principles established by Donald Van Meter and Charles Van Meter. This research employs a case study approach, employing a qualitative descriptive research framework. The data collection techniques by way of interviews, observation and documentation/documentary studies. The results of this study are that in 2022 based on the results of the Indonesian Nutrition Status Survey (SSGI) conducted by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, the prevalence rate of stunting in Sintang District shows a very significant decrease. The study's outcome reveals that the execution of the strategy aimed at expediting the reduction of stunting in the context of Sintang Family Planning has been observed, Women's Empowerment and Child Protection Services has been going well and has been successful in efforts to deal with stunting by reducing the prevalence of stunting from 38.2% to 18.7%. One of the suggestions given is the need to carry out community empowerment activities in an effort to fulfill balanced nutrition for families at risk of stunting, namely families with prospective brides, pregnant women, breastfeeding mothers, toddlers and stunted toddlers, especially from underprivileged families.

Keywords: *Implementation, Policy, Accelerating the Reduction of Stunting*

ABSTRAK

Stunting telah ditetapkan sebagai isu prioritas nasional. Target penurunan stunting 27,6 % pada tahun 2019 diharapkan menjadi 14 % pada tahun 2024. Berdasarkan hasil

Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Kabupaten Sintang memiliki angka Prevalensi Stunting terbesar kedua di Kalimantan Barat yakni sebesar 38,2 persen. Sehingga dengan tingginya angka prevalensi stunting ini dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dimana BKKBN menjadi Ketua Pelaksana, tentu membawa dampak pada perlunya koordinasi serta konvergensi program di lapangan. Sehingga hal ini mengakibatkan secara otomatis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang yang merupakan perpanjangan tangan dari Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Barat bertanggung jawab terhadap percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sintang. Oleh karena itu, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang berusaha mengerahkan berbagai upaya dalam rangka percepatan penurunan stunting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang berdasarkan pada Teori Donald Van Meter dan Charles Van Meter. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan model penelitian deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi/dokumenter. Hasil penelitian ini bahwa pada tahun 2022 berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa angka prevalensi stunting di Kabupaten Sintang menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang sudah berjalan dengan baik dan berhasil dalam upaya menangani stunting dengan menurunkan angka prevalensi stunting dari 38,2 % menjadi 18,7 %. Dalam rangka memberikan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting, seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan balita stunting, terutama yang berasal dari latar belakang kurang mampu, disarankan agar program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Percepatan Penurunan Stunting

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengakui stunting sebagai prioritas nasional. Komitmen ini ditunjukkan dengan dimasukkannya stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, dengan tujuan penurunan yang cukup besar dari proyeksi 27,6% pada 2019 menjadi 14% pada 2024. Presiden Indonesia sebelumnya menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai koordinator atau Kepala Eksekutif percepatan penurunan stunting di Indonesia, dengan PMK menjabat sebagai menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan. Inisiatif komprehensif untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk tiga generasi berikutnya, dengan fokus pada kesehatan dan gizi ibu hamil. Situasi darurat menimbulkan bahaya bagi kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia karena dampak stunting. Kesejahteraan nutrisi dan kesejahteraan fisik pada gadis remaja sebelum memasuki tahap kehamilan memiliki signifikansi yang sangat besar dalam menjaga fase penting selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (dari konsepsi hingga anak berusia 2

tahun), yakni periode krusial dalam pertumbuhan organ-organ tubuh dan otak. Oleh karena itu, esensial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nutrisi dan kesehatan secara sistemik dan berkelanjutan sejak usia remaja.

Menurut data Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Kabupaten Sintang memiliki angka Prevalensi Stunting tertinggi kedua di Kalimantan Barat, yaitu 38,2 persen, tepat di belakang Kabupaten Kubu Raya. Itulah mengapa penting untuk mengatasi masalah stunting yang meluas, yang dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan menumbuhkan sumber daya manusia berkualitas tinggi. Untuk itu melalui Peraturan Bupati Sintang Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Sintang diharapkan dapat membantu menekan angka prevalensi stunting di Kabupaten Sintang.

Masalah terkait implementasi kebijakan penurunan stunting diantaranya adalah masih belum optimalnya peran Tim Percepatan Penurunan Stunting terutama di Kecamatan dan Desa. Hal ini dikarenakan mereka masih belum memahami apa yang menjadi tugas dari Tim Percepatan Penurunan Stunting, sebab belum adanya petunjuk teknis yang mengatur hal tersebut, kurangnya pemahaman/kesadaran masyarakat terhadap sanitasi yang layak. Serta masih rendahnya perilaku masyarakat yang mendukung stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Contohnya seperti di Desa Bancoh Kecamatan Sungai Tebelian dan Desa Kemantan Kecamatan Sepauk dimana perilaku masyarakatnya yang masih ada yang Buang Air Besar Sembarangan karena tidak memiliki WC serta tidak memiliki sanitasi yang baik, kurangnya pemahaman masyarakat terkait merencanakan pernikahan, sehingga masih banyak terjadi pernikahan di usia anak. Hal ini penting untuk diperhatikan sebab anak remaja khususnya remaja putri merupakan salah satu bagian dari kategori keluarga yang beresiko stunting. Contohnya seperti di Desa Bancoh Kecamatan Sungai Tebelian dan Desa Kemantan Kecamatan Sepauk dimana ketika dilakukan audit kasus stunting terdapat 7 pasangan yang rata-rata hamil masih dalam usia anak yaitu 16-17 Tahun, kurangnya minat sasaran khususnya bagi Calon Pengantin/Pasangan Usia Subur (PUS) untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang telah disediakan. Serta belum semua agama melaksanakan bimbingan perkawinan dengan memasukkan materi tentang pencegahan stunting. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.

Tujuan utama di dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui standar dan tujuan kebijakan pelaksanaan implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, mengetahui sumberdaya yang dimiliki dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan penurunan *stunting* pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, mengetahui karakteristik agen pelaksana dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, mengetahui sikap pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan penurunan *stunting* pada Dinas

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, mengetahui komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, mengetahui kondisi lingkungan dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan penurunan *stunting* pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, mengetahui hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan penurunan *stunting* pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, serta untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam upaya menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Sintang.

LANDASAN TEORI

Teori Kebijakan Publik

Karena kebijakan publik difokuskan pada penyelesaian masalah aktual yang dihadapi oleh masyarakat, itu dapat dilihat sebagai ilmu terapan. Kebijakan, seperti yang didefinisikan oleh Anderson (dalam Islamy, 1998), adalah "seperangkat tindakan terkoordinasi yang diambil oleh aktor atau serangkaian aktor untuk mengatasi masalah," apakah masalah itu internal atau eksternal. Dari hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan memiliki kemampuan untuk diterapkan di berbagai tempat dan situasi; namun, dalam realitasnya, lebih sering dan secara meluas digunakan dalam tindakan atau perilaku pemerintah, serta perilaku entitas Negara pada umumnya, yang lebih umum dikenal sebagai kebijakan Negara atau kebijakan publik (kebijakan publik).

Teori Implementasi Kebijakan Publik

Wahab (dalam Anggara, 2012) berpendapat bahwa menjalankan kebijakan merupakan bagian penting dari proses pembuatan kebijakan yang lebih besar. Dalam arti luas, implementasi menghubungkan tujuan kebijakan dengan hasil tindakan resmi. Lebih sedikit orang, lebih sedikit kerangka kerja organisasi, dan lebih sedikit komunikasi di antara para pemangku kepentingan semuanya berkontribusi pada implementasi kebijakan yang tidak efektif. Karena pentingnya, studi kebijakan publik sekarang mencakup fokus pada bagaimana kebijakan benar-benar dipraktikkan.

Menurut model Direct and Indirect Impact on Implementation yang dibahas oleh George C. Edward III dalam Agustino (2016), keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada empat faktor berikut: (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

Kebijakan Penanggulangan Stunting yang dilakukan oleh Pemerintah

Adapun beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menangani masalah *stunting* (Siswati, 2018) diantaranya adalah RPJPN 2005–2025, rencana RPJM 2015–2019, Permenkes No.23/2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi,

Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2016-2019, dan rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2015-2019.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan dasar Kesehatan

Pencegahan dan pengurangan masalah gizi secara langsung dan terarah adalah tujuan dari terapi nutrisi tertentu. Sektor kesehatan bertanggung jawab atas pekerjaan ini, dan berbagai kegiatan pembangunan non-kesehatan memiliki wewenang untuk menerapkan intervensi sensitif gizi; upaya ini ditujukan untuk masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya pada ibu hamil dan anak kecil di 1000 Hari Pertama Kehidupan / HPK.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang. Penelitian jenis studi kasus ini dimaksudkan untuk menghasilkan deksiptif kata-kata tertulis maupun lisan dari informan. Penelitian ini memakai paradigma penelitian kualitatif, sementara metode penelitian deskriptif digunakan untuk mengatasi atau memecahkan masalah-masalah saat ini dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menganalisis, menyimpulkan, dan membuat laporan. Sumber informasi atau data dari penelitian ini terdiri atas informan kunci, pokok, dan pangkal.

Teknik atau cara untuk pencapaian pengujian data dengan menggunakan teknik keabsahan data, yaitu menggunakan triangulasi teknik dan saturasi data. Penggunaan teknik triangulasi meliputi triangulasi metode dan triangulasi sumber data. Saat mengumpulkan data, akan sangat membantu untuk menggunakan banyak sumber. Jumlah orang yang dapat diwawancarai atau dilihat untuk penelitian terbatas, sebuah fenomena yang dikenal sebagai saturasi data. Ini menunjukkan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan dari subjek penelitian tidak dianggap kredibel sampai mereka stabil, tidak terpola, atau tidak ada data dan informasi baru yang dapat dikumpulkan (jenuh). Metode pengumpulan informasi yang terdiri dari wawancara, observasi, dan penelitian kearsipan. Dalam penelitian ini, analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh, termasuk menyortir sumber primer dan sekunder ke dalam kategori masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak-anak yang kekurangan gizi kronis berisiko mengalami *stunting*, penyakit yang ditandai dengan perkembangan fisik dan kognitif yang terhambat. Hal ini menyebabkan anak-anak menjadi cacat intelektual dan terhambat dibandingkan dengan rekan-rekan mereka. Disebabkan oleh makan makanan yang tidak memberikan nutrisi yang cukup. Persentase anak balita di Indonesia yang mengalami stunting adalah 29,6 persen lebih tinggi dari target Organisasi Kesehatan Dunia, menurut Pemantauan Status Gizi (PSG) pada tahun 2017. (20 persen).

Kurangnya gizi yang cukup sepanjang 1000 hari pertama kehidupan yang kritis (1000 Hari Pertama Kehidupan), dari konsepsi (9 bulan dan 10 hari) hingga usia dua tahun, adalah akar penyebab stunting pada anak-anak. Sanitasi lingkungan hidup yang buruk, termasuk kurangnya fasilitas air bersih dan tidak tersedianya fasilitas MCK yang memadai, serta terbatasnya akses ke fasilitas kesehatan yang dibutuhkan oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan balita juga berkontribusi terhadap berat badan lahir rendah dan perkembangan terhambat.

Tabel berikut didasarkan pada deskripsi pembahasan hasil penelitian berdasarkan kerangka konseptual, serta penilaian kualitatif kualifikasi pencapaian dalam Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Percepatan Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Kabupaten Sintang.

Tabel 1. Pemetaan Hasil Penelitian

No.	Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Kualifikasi Penilaian
1.	Standar dan Tujuan Kebijakan	PP No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2022 tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Sintang menjabarkan kebijakan yang harus diikuti dan tujuannya dengan sangat rinci.	Baik
2.	Sumber Daya	Dilihat dari sisi kuantitas sudah cukup tetapi dari sisi kualitasnya masih belum merata karena belum semua orang paham mengenai bagaimana cara pencegahan stunting terutama di kecamatan dan desa.	Cukup Baik
3.	Komunikasi Antar Organisasi	Komunikasi Antar Organisasi dalam pelaksanaan Percepatan penurunan stunting sudah berjalan lintas sektoral dan konvergen artinya bergerak bersama - sama dengan melibatkan dinas terkait dan capaian hasil pelaksanaan 8 Aksi konvergensi di Kabupaten Sintang mencapai 100%.	Baik
4.	Karakteristik Organisasi Pelaksana	Ciri-ciri individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan di tingkat atas, dalam hal ini Dinas	Baik

		Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, telah menjalankan tugas dan peran masing-masing sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Sementara itu, di tingkat yang lebih rendah seperti kecamatan dan desa, setiap pelaksanaan kegiatan akan melibatkan pihak-pihak yang memiliki keahlian di bidang yang bersangkutan.	
5.	Kecenderungan Sikap Pelaksana	Beberapa kegiatan telah dilakukan untuk mempercepat penurunan stunting dan untuk selalu mendukung apa yang telah dijadwalkan dalam penanganan stunting di Kabupaten Sintang, dan sikap para pelaksana terhadap tujuan tersebut bisa dibidang positif dan sesuai dengan urusan masing-masing OPD yang membidangi program tersebut.	Baik
6.	Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	Situasi ekonomi memberikan sokongan yang memadai, dan situasi sosial terhadap program atau kegiatan yang dilakukan di wilayah tersebut cenderung positif. Di lingkup politik juga terdapat dukungan yang cukup bagi lokasi prioritas penanganan stunting.	Cukup Baik
7.	Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting	Rendahnya tingkat keterlibatan orang tua, ketidaktahuan publik, dan stigmatisasi sosial terhadap anak-anak stunting	Cukup Baik
8.	Upaya Pemerintah Daerah	Upaya pemerintah daerah sangat mendukung terhadap percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sintang	Baik

Sumber: Diolah Penulis, 2023

Berdasarkan hasil pemetaan konseptual diatas terdapat 5 dimensi dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang berada pada kriteria penilaian baik. Penilaian baik terhadap 5 dimensi yang dimaksud yaitu Standar dan Tujuan Kebijakan, Komunikasi Antar Organisasi Karakteristik Organisasi Pelaksana, Kecenderungan Sikap Pelaksana dan Upaya Pemerintah Daerah terhadap percepatan penurunan stunting.

Selanjutnya terdapat 2 dimensi pelaksanaan Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang pada kriteria cukup baik, yaitu Sumber Daya dan Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang sangat relevan dari perspektif Van Meter dan Van Horn berdasarkan penelitian penulis tentang Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kantor Keluarga Berencana. Ini terjadi ketika beberapa indikator kunci dipertimbangkan, seperti standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, dan karakteristik organisasi pelaksana. Variabel yang diusulkan Donald Van Meter dan Carl Van Horn untuk mengukur kinerja Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Dinas Perlindungan Anak semuanya berinteraksi satu sama lain.

Konsistensi dan upaya terkoordinasi dalam memahami substansi, keputusan, dan kepentingan, serta pengaturan implementasi strategi dilihat dari perspektif yang berbeda, seperti metode, peluang, atau implementasi strategi, merupakan keunggulan dari kebijakan yang berhasil diimplementasikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan dilaksanakan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan mengenai Implementasi Kebijakan Percepatan Stunting pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, sudah berjalan dengan baik dan berhasil dalam upaya menangani stunting dengan menurunkan angka prevalensi stunting dari 38,2% menjadi 18,7%.

SARAN

Berkenaan dengan pengembangan teori kebijakan, peneliti mengusulkan untuk mempertimbangkan bahwa dalam penelitian ini terdapat kekurangan dalam penggunaan sumber-sumber dan referensi yang secara langsung terhubung dengan Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting. Oleh karena itu, bagi peneliti masa depan, disarankan untuk meningkatkan jumlah sumber-sumber dan referensi yang akurat terkait dengan isu yang sedang diangkat. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan memperdalam analisis pelaksanaan Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting.

Peneliti mengajukan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat agar berpartisipasi dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat

yang bertujuan untuk memberikan pola gizi yang seimbang kepada keluarga yang berisiko mengalami stunting. Keluarga-keluarga yang termasuk dalam kategori risiko ini mencakup calon pengantin, ibu yang sedang hamil, ibu yang sedang menyusui, anak balita, serta anak balita yang mengalami stunting. Khususnya, fokusnya adalah pada keluarga-keluarga yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang menguntungkan. perlunya memberikan pelatihan atau bimbingan teknis kepada para Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk peningkatan kapasitas dalam penanganan stunting, karena Tim Pendamping Keluarga sebagai ujung tombak dalam pencegahan stunting. perlunya meningkatkan kesadaran dan peran serta dari anak, orangtua, sekolah, pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan lain dalam upaya mencegah perkawinan anak. perlunya menjalin kemitraan dengan pihak lain baik dari pihak non pemerintah seperti swasta maupun akademisi untuk terlibat dalam penanganan stunting, contohnya kampanye pencegahan *stunting* dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran atau program Ayah/Bunda Asuh Anak Stunting untuk anak – anak yang berisiko stunting di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung : CV. Pustaka Setia
- Agustino, H dan Widodo, E. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pencegahan Stunting di Kabupaten Malang. *Sospol : Jurnal Sosial Politik*. Vol. 8. No. 2. 241-252.
- Apriluana, G., & Fikawati, S. (2018). Analisis Faktor-Faktor Risiko terhadap Kejadian Stunting pada Balita (0-59 Bulan) di Negara Berkembang dan Asia Tenggara. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*. Vol 28. No 4. 247-256.
- Azzahra, J. (2022). Implementasi Kebijakan 5 Pilar Penurunan Stunting Dan Faktor Yang Mempengaruhinya Di Nagari Panningahan Kabupaten Solok. *JPDGE : Journal Of Policy, Governance, Development and Empowerment*. Vol. 2. No.1. 8-13.
- Bella, F. D., Fajar, N. A., & Misnaniarti, M. (2020). Hubungan pola asuh dengan kejadian stunting balita dari keluarga miskin di Kota Palembang. *Jurnal Gizi Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition)*. Vol. 8. No.1. 31-39
- Bungin, B. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Dermawan, A., Mahanim, dan Siregar, N. (2022). Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Asahan. *Jurnal Bangun Abdmas*. Vol 1. No 2. 98-104.
- Dunn. WN. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.

- Ekayanthi, N dan Suryani P. (2019). Edukasi Gizi pada Ibu Hamil Mencegah Stunting pada Kelas Ibu Hamil. *Jurnal Kesehatan*. Vo. 10. No. 3. 312-318
- Febrian, F dan Yusran, R. (2021). Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik (MAP)*. Vol. 3. No.1. 11-21.
- Fikawati. S. dan Syafiq, A.V. (2017). *Gizi Anak dan Remaja*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- Friska, E dan Andriani H. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kudus. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol. 1. No. 5. 586-592.
- Harizal N., Neherta M., dan Yeni F. (2021). Upaya Pencegahan Stunting pada Balita Menggunakan Intervensi Pendidikan Kesehatan Gizi pada Ibu Hamil. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*. Vo. 11. No. 1. 151-168.
- Iqbal, M., & Yusran, R. (2021). Upaya Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 3. No. 1. 109-116.
- Kemenkes. R. I. (2018). *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2017*. Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat.
- Kinanti, A dan Yusran, R. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Berbasis Nagari di Nagari Kajai Pasaman Barat. *Journal of Civic Education*. Vol.5. No.3. 293-300.
- Listyarini A D & Fatmawati Y. (2020). Edukasi gizi ibu hamil dengan media booklet tentang perilaku pencegahan balita stunting di Wilayah Puskesmas Undaan Kabupaten Kudus. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*. Vol. 11. No. 1. 100-105.
- Maulana, I.N., Sholihah, Q, dan Wike. (2022). Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik Sebagai Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP)*. Vol. 8. No. 2. 136-144.
- Moksin, M.V., Muslim, R, dan Ishak, S.N. (2022). Pencegahan Stunting di Wilayah Ternate Melalui Perubahan Perilaku Ibu Hamil. *Jurnal Serambi Sehat*. Vol.XV. No. 1. 27-35.
- Moleong Lj. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Muchlis, H. (2019). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Muthia G dan Yantri E. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting Ditinjau dari Intervensi Gizi Spesifik Gerakan 1000 HPK Di Puskesmas Pegang Baru Kabupaten Pasaman. *Jurnal Kesehatan Andalas*. Vol. 8. No. 4. 100-108.
- Nasution, I.S, Susilawati. (2022). Analisis faktor penyebab kejadian stunting pada balita usia 0-59 bulan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*. Vol. 1. No. 2. 82-87.
- Nisa, L.S (2020). Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*. Vol. 13. No.2. 173-179.
- Nuradhiani, A. (2022). Upaya Pencegahan Stunting Sejak Dini melalui Pemberian Edukasi pada Ibu Hamil. *Jurnal Gizi Kerja dan Produktivitas*. Vol. 3. No. 1. 46-50.
- Nurfatimah N, Anakoda P, Ramadhan K, Entoh C, Sitorus S B M, dan Longgupa L W. (2021). Perilaku pencegahan stunting pada ibu hamil. *Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan*. Vol. 10. No. 4. 97-104.
- Puspitasari, W. (2022, 14 Juli). BKKBN : Ketepatan program dan sasaran jadi kunci penurunan stunting dalam *Antara News*.
- Rahman, Z, dkk. (2021). Analisis Kebijakan Pencegahan Stunting dan Relevansi Penerapan di Masyarakat (Studi Kasus : Desa Donowarih). *Jurnal Karta Rahardja*. Vol. 2. No. 1. 27-33.
- Salamung S, Haryanto J, dan Sustini F. (2019). Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pencegahan stunting pada saat ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*. Vol. 10. No. 4. 264-269.
- Saputri, R.A. (2019). Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*. Vol 2. No. 2. 152-168.
- Saputri, R.A, dan Tumangger, J. (2019). Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia. *JPI : Jurnal of Political Issues*. Vol.1. No.1. 1-9
- Shauma,N.U., dan Purbaningrum, D.G. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol. 13. No. 2. 200-207.
- Siswati, T. et al. (2021). Literasi Stunting pada Masa Pandemi Covid-19 untuk Ibu Balita dan Kader Posyandu Desa Umbulrejo Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara*. Vol. 4. No. 2. 407-416

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 6 Nomor 2 (2024) 2216-2227 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v6i2.4948

- Sudarwan, D. (2005). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2000). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suwitri. S. dkk. (2014). *Analisis Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Sunaryo, D.S., Candradewini, dan Arifianti, R. (2021). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*. Vol. 4. No. 4. 205-213.
- Tohardi, A. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*. Makassar : Nas Media Pustaka.
- Tohardi, A. (2020). Model Penelitian Kebijakan Kualitatif "Tohardi". *JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development*. Vol. 1. No. 1. 59 – 77.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Widyaningsih, N. N., Kusnandar, K., & Anantanyu, S. (2018). Keragaman pangan, pola asuh makan dan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan. *Jurnal Gizi Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition)*. Vol. 7. No.1. 22-29.
- Wiguna, A.R.,Meigawati,D. dan Amirulloh, M.R. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. Vol. 6. No. 1. 28-37.